

Analisis Dokumen dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang: Studi Kasus Teknik Elektro Industri

Juli Sardi^{1*}, Habibullah¹, Nurhizrah Gistituati², Alwen Bentri³, Devi Faizah Yuliana⁴

¹Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

²Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang

³Departemen Teknologi Kurikulum Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang)

⁴Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Kerinci

*Corresponding Author: julisardi@ft.unp.ac.id

Abstract— The issuance of Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards (SN-DIKTI) encourages Study Programs in Higher Education to review their curriculum. The implementation of the MBKM program for Undergraduate and Applied Undergraduate Programs has an impact on the learning process where students are given the right to take their studies in three semesters outside their study program. The D4 Industrial Electrical Engineering Study Program at Padang State University is one of the study programs that has implemented the MBKM curriculum since 2021. However, so far no evaluation has been carried out either of the completeness of the curriculum documents or the implementation of the MBKM curriculum itself. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques in qualitative research are observation, interviews, and documentation studies. The results obtained in this study are the completeness of the 81.8% Industrial Electrical Engineering D4 Study Program curriculum documents with details of 54.5% of the curriculum documents can be shown in writing and 27.3% cannot be shown in writing. The remaining 18.2% of curriculum documents do not exist / complete. Until now, the D4 Industrial Electrical Engineering Study Program has only carried out 1 type of MBKM activity / activity, namely Internships / Work Practices. In 2022 the number of students who participated in MBKM Internships / Work Practices amounted to 99 out of 458 students with a percentage of 21.62%. Meanwhile, for 2023 the number of students who participated in Internships / Practical Work was 102 out of 364 students with a percentage of 28.02%. Based on these findings, it is concluded that the completeness of documents and the implementation of MBKM in the D4 Industrial Electrical Engineering Study Program has gone well and is in accordance with applicable regulations.

Keywords: Curriculum, MBKM, Vocational, Higher Education.

I. PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan [1]. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga berubah mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Bagi khalayak umum seringkali perubahan tersebut dipersepsikan secara keliru sebagai suatu keharusan bahwa setiap ganti menteri pendidikan, ganti pula kurikulum pendidikannya. Akan tetapi sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku. Landasan filosofi pengembangan kurikulum memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan [2].

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) [3], dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut [4]. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan

dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9. KKNI merupakan instrumen yang penting untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia [5]. Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi [6]. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) mendorong Program Studi di Perguruan Tinggi meninjau kembali kurikulumnya [7]. Namun demikian, pengembangan kurikulum di Perguruan Tinggi tetap berlandaskan pada KKNI yang mengatur kesetaraan dan jenjang program pendidikan. Standar penyelenggaraan program studi diatur lebih rinci sesuai jenjangnya dalam SN-Dikti. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi tertuang dalam SN-Dikti, termasuk CPL Sikap dan CPL Keterampilan Umum yang ada dalam Lampiran. Program sarjana/sarjana terapan dengan program lanjutan Program Pendidikan Profesi memiliki ketentuan-ketentuan lain yang mengikat sebagai keutuhan untuk menghasilkan keahlian/keterampilan tertentu, misal dokter, guru, apoteker, perawat, bidan dan sebagainya. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) didukung oleh keberagaman bentuk pembelajaran (Pasal 14 SN-Dikti) dan adanya fasilitas bagi mahasiswa untuk menempuh studinya dalam tiga (3) semester di luar program studinya (Pasal 18 SN-Dikti). Implementasi program MBKM diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan [8]. Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi tetapi dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar prodinya selama 3 semester, memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana terapan [9]. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat.

Beberapa penelitian mengungkapkan dampak positif terhadap implementasi kurikulum dan aktivitas MBKM dalam proses pembelajaran. Implementasi aktivitas MBKM berdampak positif terhadap kemampuan berkolaborasi, berkontribusi, dan pengembangan diri peserta didik [10]. Peserta didik yang mengikuti aktivitas MBKM memiliki kemampuan berkolaborasi yang lebih baik, kemampuan berkontribusi yang lebih baik, dan memiliki pengembangan diri yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mengikuti aktivitas MBKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka berdampak positif terhadap motivasi belajar, penguasaan kompetensi, dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik [11]. Peserta didik yang menerapkan kurikulum Merdeka memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, penguasaan kompetensi yang lebih baik, dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang tidak menerapkan kurikulum Merdeka.

Program Studi D4 Teknik Elektro Industri Universitas Negeri Padang merupakan salah satu program studi yang telah mengimplementasikan kurikulum MBKM sejak tahun 2021. Dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM, Program Studi D4 Teknik Elektro Industri telah melakukan berbagai persiapan, seperti menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum MBKM di Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi D4 Teknik Elektro Industri. Sejauh ini belum ada evaluasi yang dilakukan terkait kelengkapan dokumen kurikulum atau implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM. Ini dapat menjadi permasalahan karena evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana kurikulum telah mencapai tujuan dan apakah ada perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, bahwa belum ada penilaian terhadap kelengkapan dokumen kurikulum. Kurangnya dokumen atau kelengkapan dokumen yang tidak memadai dapat mempengaruhi efektivitas kurikulum dan dapat menyulitkan pemahaman dan implementasi oleh dosen dan mahasiswa. Maka berdasarkan kondisi tersebut dilakukan penelitian terkait dengan evaluasi dan implementasi Kurikulum MBKM pada Program Studi D4 Teknik Elektro Industri.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis kelengkapan dokumen dan implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM di Program Studi D4 Teknik Elektro Industri Universitas Negeri Padang. Mengevaluasi sejauh mana dokumen kurikulum MBKM di Program Studi D4 Teknik Elektro Industri Universitas Negeri Padang terlengkap. Ini mencakup penilaian terhadap struktur, kejelasan, dan keterkaitan antarbagian dalam dokumen kurikulum. Selain itu, bagaimana MBKM diimplementasikan di lapangan, baik oleh dosen maupun mahasiswa. Ini mencakup aspek-aspek seperti metode pengajaran, penggunaan sumber daya, keterlibatan mahasiswa. Manfaat dari

penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kualitas kurikulum MBKM di Program Studi D4 Teknik Elektro Industri. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pengembangan dan penyempurnaan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Industri.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif [12], dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode ini cocok digunakan untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan konteks dari suatu kejadian atau kondisi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, yang artinya peneliti secara aktif terlibat dalam pengumpulan dan interpretasi data. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif [13]. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara *nonparticipatant observation* terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM. Wawancara dilakukan untuk sebagai upaya memperoleh data yang akurat dari sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 5 orang informan, yang terdiri dari Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa D4 Teknik Elektro Industri. Studi dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan kelengkapan dokumen dan implementasi Kurikulum MBKM di Prodi D4 Teknik Elektro Industri. Analisis data dilakukan secara induktif, yang berarti peneliti mengembangkan temuan atau konsep dari data yang dikumpulkan, bukan berdasarkan teori sebelumnya. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Penyusunan Kurikulum Program Studi D4 Teknik Elektro Industri

Program Studi D4 Teknik Elektro Industri Universitas Negeri Padang merupakan salah satu Program Studi Vokasi yang ada di Universitas Negeri Padang. saat ini, Prodi tersebut dipimpin oleh Dr. Muldi Yuhendri, S.Pd, M.T. Berdasarkan wawancara dan keterangan yang beliau sampaikan, dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, Prodi D4 Teknik Elektro Industri selalu berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. Ada evaluasi yang dilakukan melalui *Tracer Study*, kurikulum disusun berdasarkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengguna lulusan. Secara teknis, penyusunan dan pengembangan kurikulum berpedoman kepada Panduan Pengembangan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Padang Pada Tahun 2020.

Berdasarkan panduan tersebut dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing Program Studi, namun demikian dalam pengembangan kurikulum prodi harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum yang dikembangkan seharusnya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan, mendorong semangat kepedulian kepada sesama bangsa dan ummat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan serta kejayaan bangsa Indonesia. Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat [14]. Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar [2]. Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia [15]. Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan *civitas academia* di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu

meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman [16]. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

Dalam konteks kekinian, peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincuhan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*) [17]. Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat [18]; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan [14]; kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945. Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya [19].

Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum [20]. Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012. Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015.

Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian [21]. Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Perguruan tinggi memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya. Karena itu pengembangan kurikulum juga selaras dengan kebijakan di Perguruan Tinggi masing-masing, sehingga lulusan setiap Perguruan Tinggi dapat memiliki keunggulan dan penciri yang membedakan dari lulusan Perguruan Tinggi lainnya.

B. Analisis Kurikulum MBKM Prodi D4 Teknik Elektro Industri

Analisis kelengkapan dokumen kurikulum yang dilakukan merujuk kepada kelengkapan dokumen kurikulum yang terdapat didalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. Hasil analisis kelengkapan dokumen kurikulum pada Prodi D4 Teknik Elektro Industri dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Kelengkapan Dokumen Kurikulum Prodi D4 Teknik Elektro Industri

No	Kelengkapan Dokumen	Keterangan
1	Identitas Program Studi	Ada
2	Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study	Ada
3	Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum	Belum
4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.	Ada
5	Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Ada
6	Penetapan Bahan Kajian	Ada
7	Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS	Ada
8	Matriks dan Peta Kurikulum	Ada
9	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Ada
10	Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi	Belum
11	Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum	Ada

Dari tabel terlihat bahwa dari 11 dokumen kelengkapan kurikulum, Prodi D4 Teknik Elektro Industri memiliki persentase kelengkapan dokumen kurikulum sebesar 81,8 % dan sisanya sebesar 18,2% dokumen kurikulum belum ada/lengkap. Berdasarkan data tersebut ada 2 dokumen yang belum dimiliki/disipakan oleh Prodi D4 Teknik Elektro Industri yaitu dokumen landasan perancangan dan pengembangan kurikulum dan dokumen rencana implementasi hak belajar mahasiswa mahasiswa 3 semester di luar prodi. Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum merupakan salah satu dokumen penting yang sebenarnya harus ada dalam setiap kurikulum. Isinya terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis dan landasan yuridis dari sebuah kurikulum. Landasan filosofis merupakan landasan yang paling fundamental dari semua landasan pendidikan lainnya. Landasan ini memberikan arah dan tujuan kurikulum. Landasan sosiologis merupakan landasan yang memberikan gambaran tentang masyarakat sebagai tempat berlangsungnya pendidikan. Landasan ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Landasan psikologis merupakan landasan yang memberikan gambaran tentang peserta didik sebagai subjek pendidikan. Landasan ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan cara belajar peserta didik. Landasan yuridis merupakan landasan yang memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan [22].

Dokumen rencana implementasi hak belajar mahasiswa mahasiswa 3 semester di luar prodi merupakan implementasi kebijakan MBKM yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT. Didalam panduan pengembangan kurikulum UNP tahun 2020 sudah diuraikan secara rinci bahwa semua Prodi sarjana/sarjana diwajibkan untuk menyusun kurikulum dengan mengakomodir kegiatan/aktivitas merdeka belajar didalam kurikulum. Untuk program studi sarjana terapan, sudah ada ketentuan berupa matriks struktur kurikulum yang bisa dijadikan panduan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum MBKM seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	9								
Wajib Universitas (WU)	11								
Pilihan Wajib Universitas	2								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN, dan PL)	62								

kurikulum. Akibatnya, anggota tim penyusun kurikulum mungkin tidak mengetahui secara lengkap apa saja dokumen-dokumen yang harus ada dalam sebuah kurikulum. 2) Kurangnya supervisi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak UNP terkait kelengkapan dokumen kurikulum Prodi yang ada di selingkungan UNP. Hal ini dapat menyebabkan proses penyusunan kurikulum di Prodi D4 Teknik Elektro Industri UNP tidak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk mengatasi permasalahan kurikulum beserta dokumen kelengkapannya di Prodi D4 Teknik Elektro Industri, saat ini sudah dibentuk Tim Task Force Revitalisasi Kurikulum Prodi yang diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu secepatnya. Selain itu, juga diharapkan ada pendampingan yang dilakukan oleh pihak UNP dengan melibatkan pakar-pakar kurikulum yang ada di UNP terutama untuk Prodi Non Kependidikan sehingga Kurikulum yang disusun oleh Prodi sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diperuntukkan bagi Program Sarjana dan Sarjana Terapan. Program ini tetap ditujukan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan oleh setiap Program Studi tetapi dengan bentuk pembelajaran yang berbeda. Hak mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan belajar di luar prodinya selama 3 semester, memberi kesempatan untuk mendapatkan kompetensi tambahan di luar Capaian Pembelajaran yang ditetapkan Prodi sebagai bekal untuk masuk di dunia kerja setelah lulus sarjana/sarjana terapan. Di samping itu, pengalaman yang diperoleh akan memperkuat kesiapan lulusan dalam beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja, kehidupan di masyarakat dan menumbuhkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. Untuk memberikan panduan program studi dalam pengembangan/ penyesuaian kurikulum dalam mengimplementasikan MBKM dan peningkatan kualitas program studi, orientasi pengembangan kurikulum ini ditambahkan panduan implementasi program MBKM dan implementasi Outcome Based Education (OBE) yang menjadi standar penilaian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME, Akreditasi Nasional dan Internasional).

Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL, Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya. Ketiga, dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Keempat, kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (scientific vision) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*). Program MBKM memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di dalam perguruan tinggi yang sama, maupun di luar perguruan tinggi asal mahasiswa.

C. Implementasi Aktivitas MBKM Prodi Teknik Elektro Industri

Implementasi Aktivitas MBKM di Universitas Negeri Padang diatur melalui Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang. Sesuai dengan buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, terdapat berbagai jenis kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar program studinya, seperti: pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di suatu satuan pendidikan, penelitian/riset di suatu instansi/ institusi, melakukan proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, atau membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diambil oleh mahasiswa tersebar dalam maksimum 3 (tiga) semester. Pada berbagai kegiatan yang disebutkan di atas, mahasiswa tetap dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran lainnya (baik di program studi sendiri atau di sumber belajar lainnya) sesuai dengan jumlah maksimum beban sks yang dimiliki oleh mahasiswa pada suatu semester. Dalam hal ini, program studi perlu pula menyiapkan berbagai moda dan strategi pembelajaran untuk mengakomodir proses pembelajaran mahasiswa selama mereka melaksanakan berbagai kegiatan pembelajaran di luar program studinya [23].

1. Analisis Mekanisme Pelaksanaan MBKM Prodi D4 Teknik Elektro Industri

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, Prodi D4 Teknik Elektro Industri belum membentuk Tim Pengelola MBKM Tingkat Prodi seperti yang dijelaskan dalam panduan pengembangan kurikulum UNP. Selama ini kegiatan/aktivitas MBKM langsung dikoordinir oleh Kaprodi. Secara umum, mekanisme tersebut belum dilaksanakan secara baik dengan mekanisme yang jelas oleh Prodi. Tidak ada dokumen pasti yang bisa diperlihatkan terkait dengan mekanisme pelaksanaan MBKM pada Prodi D4 Teknik Elektro Industri. Mekanisme pelaksanaan MBKM pada Prodi sudah diatur melalui Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2021 dengan mekanisme sebagai berikut 1) membentuk Tim Pengelola MBKM tingkat Prodi, 2) menentukan CPL dan menyusun atau menyesuaikan kurikulum untuk mencapai CPL tersebut dengan model implementasi kampus merdeka, 3) menentukan matakuliah penciiri (body knowledge) dan matakuliah yang bebas diambil secara merdeka, 4) menentukan hardskill dan softskill agar dapat dicapai melalui kegiatan di luar PT, 5) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi, 6) menawarkan mata kuliah yang bisa diambil

oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya, 7) melakukan ekuivalensi (rekognisi atau konversi) mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, 8) Mendorong mahasiswa untuk mengikuti program MBKM dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan dan 9) Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

Hal ini menunjukkan bahwa Prodi D4 Teknik Elektro Industri belum maksimal dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). MBKM merupakan kebijakan baru yang menuntut perguruan tinggi untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada program studi dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh program studi dalam menerapkan MBKM adalah membentuk Tim Pengelola MBKM Tingkat Prodi. Tim Pengelola MBKM Tingkat Prodi memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan MBKM di program studi. Tim ini terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang MBKM. Pada langkah-langkah selanjutnya, Prodi D4 Teknik Elektro Industri belum memiliki mekanisme yang jelas. Hal ini menyebabkan pelaksanaan MBKM di program studi tersebut menjadi tidak terarah dan tidak terukur. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Prodi D4 Teknik Elektro Industri perlu membentuk Tim Pengelola MBKM Tingkat Prodi. Tim ini perlu menyusun mekanisme pelaksanaan MBKM yang jelas dan terukur. Mekanisme ini harus mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 2 tahun 2021. Dengan adanya mekanisme pelaksanaan MBKM yang jelas dan terukur, diharapkan pelaksanaan MBKM di Prodi D4 Teknik Elektro Industri dapat berjalan secara optimal.

2. Analisis Implementasi Aktivitas MBKM Prodi D4 Teknik Elektro Industri

Dari jenis-jenis aktivitas MBKM yang ada, Prodi D4 Teknik Elektro Industri sampai saat ini hanya melakukan 1 jenis aktivitas/kegiatan MBKM yaitu Magang/Praktik Kerja. Menurut Kaprodi alasan kenapa kegiatan MBKM hanya fokus pada kegiatan Magang/Praktik Kerja adalah terkait dengan pencapaian SKL, CPL dan CPMK. Kaprodi menilai aktivitas lain selain Magang/Praktik Kerja sangat sulit dalam merumuskan SKL, CPL dan CPMK. Penilaian ini dapat dimaklumi, mengingat Magang/Praktik Kerja merupakan aktivitas MBKM yang paling mudah untuk dikaitkan dengan pencapaian SKL, CPL, dan CPMK. Hal ini karena Magang/Praktik Kerja melibatkan mahasiswa dalam kegiatan nyata di dunia kerja. Namun, penilaian tersebut juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan MBKM di Prodi D4 Teknik Elektro Industri. Hal ini karena MBKM memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri secara holistik, baik dari segi akademik, profesional, maupun personal. Aktivitas MBKM selain Magang/Praktik Kerja, seperti Kerja Praktek, Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, Studi Independen, dan Pertukaran Mahasiswa, juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri secara holistik. Untuk mengatasi kendala tersebut, Prodi D4 Teknik Elektro Industri perlu melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan mekanisme pelaksanaan MBKM yang lebih komprehensif. Mekanisme ini perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan [24].

Pelaksanaan/implementasi MBKM di Prodi D4 Teknik Elektro Industri dilihat dari jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM sudah cukup besar. Pada tahun 2022 berdasarkan data capaian IKU 2 Prodi D4 Teknik Elektro Industri jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM Magang/Praktik Kerja berjumlah 99 dari 458 mahasiswa dengan persentase 21,62 %. Sedangkan untuk tahun 2023 jumlah mahasiswa yang mengikuti Magang/Praktik Kerja 102 dari 364 mahasiswa dengan persentase 28,02 %. Kenaikan persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM Magang/Praktik Kerja dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan MBKM di Prodi D4 Teknik Elektro Industri semakin baik. Peningkatan persentase jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM Magang/Praktik Kerja merupakan hal yang positif. Namun, perlu diperhatikan bahwa MBKM memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri secara holistik, baik dari segi akademik, profesional, maupun personal. Oleh karena itu, Prodi D4 Teknik Elektro Industri perlu mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai jenis aktivitas MBKM, tidak hanya Magang/Praktik Kerja. Dengan demikian, mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pelaksanaan MBKM.

Pelaksanaan MBKM untuk mahasiswa di Prodi D4 Teknik Elektro Industri hanya dilaksanakan selama 1 semester dengan jumlah yang diakui 20 SKS. Pelaksanaan MBKM selama 1 semester dengan jumlah yang diakui 20 SKS masih belum optimal dalam mencapai tujuan MBKM. Hal ini karena mahasiswa hanya memiliki kesempatan untuk mengikuti satu jenis aktivitas MBKM. Pelaksanaan MBKM ini masih belum sesuai dengan kebijakan yang ada, dimana untuk aktivitas MBKM dilaksanakan sebanyak 3 Semester dengan ekuivalensi 60 SKS. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah 1) adanya pro kontra diantara dosen didalam Prodi akibat kurangnya pengetahuan dosen terkait dengan MBKM, 2) jika MBKM dilaksanakan sebanyak 3 semester, ada kecemasan dosen terkait dengan jam mengajar Dosen. Sistem konversi aktivitas MBKM yang dilaksanakan oleh Prodi D4 Teknik Elektro dilakukan oleh Kaprodi. Didalam panduan kurikulum sistem konversi SKS dilakukan dalam bentuk bebas (free form), namun kenyataannya sistem konversi yang dilakukan dilaksanakan dalam bentuk

berstruktur (structured form). Sistem konversi ini dilakukan dengan langsung memberikan nilai terhadap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ketika pelaksanaan MBKM dilaksanakan.

IV. PENUTUP

Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas dan relevan bagi mahasiswa. Pada Prodi D4 Teknik Elektro Industri, kelengkapan dokumen dan implementasi MBKM secara umum sudah berjalan dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi dan diperbaiki agar MBKM dapat dilaksanakan secara maksimal. Struktur kurikulum Prodi D4 Teknik Elektro Industri sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kurikulum tersebut mencakup 4 semester pembelajaran di program studi dan 3 semester pembelajaran di luar program studi. Saat ini, aktivitas MBKM yang dilaksanakan di Prodi D4 Teknik Elektro Industri hanya Magang/Praktik kerja. Pelaksanaan MBKM baru dilaksanakan sebanyak 1 Semester. Konversi Aktivitas MBKM dilakukan dalam bentuk terstruktur (*Structure Form*). Artinya, jumlah sks yang diperoleh mahasiswa dari setiap aktivitas MBKM sudah ditentukan. Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum perlu disempurnakan untuk memastikan bahwa kurikulum MBKM yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kebutuhan industri. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti mahasiswa, dosen, industri, dan pemerintah.

REFERENSI

- [1] Junaidi, A. dkk. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020.
- [2] Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. *CURRICULUM: Foundations, Principles, and Issues (4 ed.)*. New York: Pearson, 2014.
- [3] Presiden Republik Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.
- [4] Presiden Republik Indonesia. Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012.
- [5] Solikhah, I. *KKNI Dalam Kurikulum Berbasis Learning Outcomes*. LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, 12(1), 1-22, 2015.
- [6] Fauziyati, D. *Pengembangan Kurikulum Program Magister Pendidikan Agama Islam Mengacu KKNI Dan SN-Dikti Di PTKI (Studi Kasus Di UIN Sunan Kalijaga Dan Universitas Ahmad Dahlan)*. Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- [7] Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.
- [8] Mumtahanah, N., & Aslamiyah, S. S. *Kebijakan Merdeka belajar Kampus merdeka (MBKM) di Indonesia*. Akademika, 17(2), 2023.
- [9] Halim, A. *Rekognisi dan Kendala yang dihadapi Program Studi Teknik Sipil Universitas Widyagama Malang dalam Implementasi MBKM*. In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) (pp. 1047-1054), 2021.
- [10] Andayani, E. *Case Method: Mengoptimalkan Critical Thinking, Creativity Communication Skills dan Collaboratively Mahasiswa Sesuai MBKM di Era Abad 21*. Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS, 16(1), 52-60, 2022.
- [11] Devi, S., Asbari, M., & Anggel, C. *Kurikulum Merdeka yang Memerdekakan Manusia: Perspektif Munif Chatib*. Journal of Information Systems and Management (JISMA), 3(1), 48-52, 2024.
- [12] Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008.
- [13] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [14] Zais, R. S. *Curriculum: Principle and Foundations*. New York: Harper & Row, 1976.

- [15] Attard, A., Di Lorio, E., Geven, K. and Santa, R. *Student-centred learning –Toolkit for students, staff and higher education institutions*. Brussels: European Students Union, 2010.
- [16] Allen, I. E, Seaman, J., and Garrett, R. *Blending in The Extent and Promise of Blended Education in the United States*. Sloan-C., MA-USA, 2007.
- [17] Caliguri,P. *Cultural Agility: Building a Pipeline of Successful Global Professionals*. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2012.
- [18] Suryaman, M. *Orientasi pengembangan kurikulum merdeka belajar*. In Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra. pp. 13-28, 2020.
- [19] Susilo, A., & Sarkowi, S. *Peran Guru Sejarah Abad 21 dalam Menghadapi Tantangan Arus Globalisasi*. Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 2(1), 43-50, 2018.
- [20] Anggrawan, I. A., Herawati, B. C., ST, M., Suhendra, E., & Soraya, S. *Pendidikan Implementasi Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [21] Mustaqim, I. *Pengaruh strategi pembelajaran berbagi pengetahuan dan efikasi diri terhadap kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif*. Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang, 2022.
- [22] Uno, H. B. *Landasan pendidikan*. Bumi Aksara, 2022.
- [23] Frismelly, A & Mukhaiyar, R. *Studi Kelayakan Penginputan Keilmuan Image Processing pada Kurikulum Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang*. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro (JPTE), Vol 1 No 1, 2020.
- [24] Arnelis, M & Mukhaiyar, R. *Analisa Course Scoring dari Kurikulum Prodi Teknik Listrik UNP*. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro (JPTE), Vol 1 No 1, 2020.